

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Amin, Ma'ruf, 2007, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*, Tim Penanggulangan Terorisme MUI, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Jakarta.
- Gani, Abdullah, Abdul, 2006, *Penelitian Hukum Tentang Pola Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam hukum Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Harahap, Yahya M., 2007, *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, Cetakan ke-IX, Kartini, Jakarta.
- Hasibuan, H. Malayu S.P., 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketiga, Bina Aksara, Jakarta.
- Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta.
- Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hendropriyono, A.M., 2009. *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Buku Kompas, Jakarta.
- Kristian, Gunawan, Yopi, 2013. *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Kustia, Aa, 2007, *Intelijen, Dilema dan Tantangan*, Centre For The Study Of Intelligence And Counterintelligence, Jakarta.
- Nasution, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito, Bandung.

- Milnes Holden, J., 1970, *The Law And Practice of Banking Vol. 1 Banker and Customer*, Pitman.
- Moleong, Lexy J., 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Adikarya, Yogyakarta.
- Mustofa, Muhammad, 2002, *Memahami Terorisme, suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia, FISIP UI, vol 2 No. III (desember 2002).
- Muladi, 2002, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pegaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia, FISIP UI, vol2 No. III (Desember 2002).
- Nusantara, Abdul Hakim G., 1992, *KUHAP*, Cetakan ke-III, Jambatan, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Seno Adji, Indriyanto, 2001, “*Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*” dalam *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, Jakarta.
- Simorangkir, O.P., 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Perbanas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suratman dan Dillah, H. Philip, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Subihat, Ihat, 2014. *Yurisdiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Imperium, Yogyakarta.
- Suyatno, Thomas, 1987, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiyono, R., 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yektiningsih, Deti, 2009, *Memburu Teroris Pertempuran Densus 88 vs Kelompok Teroris Noordin M. Top*, Cetakan Pertama, Buku Kita, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385).
- Pedoman PPATK: Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

### **C. Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Terorisme”, <http://kbbi.web.id/terorisme> , diakses 18 Juli 2016.

Jurnal Intelijen, “Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia”, <http://jurnalintelijen.net/2015/12/28/perubahan-pola-pendanaan-terorisme-di-indonesia/>, diakses 18 Mei 2016.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Padmo Wasono, Sutjahjo, 2008, *Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudarmadi, Suryo, 2011, *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Jurnal Kriminologi Indonesia, FISIP UI, vol2 No. III (desember 2002).